



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

UNIT KERJA : BIDANG KEMASLAHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SATYO MINDROWO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **415201**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.088.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/115 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 924 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 5 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
6. Tanah Seluas 5 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
7. Bangunan Seluas 12 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 604.000.000

1. MOTOR, VESPA GTS150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
4. MOBIL, WULING CLOUD Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
361.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	139.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.020.965
F. HARTA LAINNYA	Rp.	143.966.748
Sub Total	Rp.	5.035.487.713
III. HUTANG	Rp.	1.388.357.527
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.647.130.186

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.